

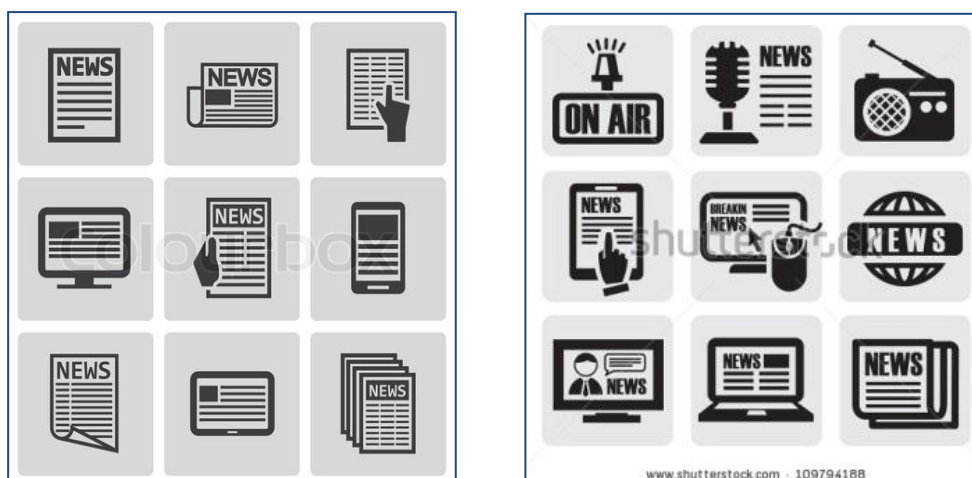


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Politik

Senin, 6 Oktober 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. SEGERA UMUMKAN PERSONEL KABINET (*Media Online Indonesia Finance Today*)

subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.ft.co.id

DECIDE NOW

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499

Idea Bloomberg TV INDONESIA Bloomberg Businessweek

INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Senin, 6 Oktober 2014

Halaman 1&7, Kolom 1-5

Segera Umumkan Personel Kabinet

Presiden terpilih Joko Widodo diharapkan menunjuk menteri ekonomi yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dusep Malik, I. Edo Nur Karensa

JAKARTA - Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini, bisa segera diatasi dengan catatan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan nama-nama menteri yang sesuai dengan ekspansi pasar, menurut ekonomi. Menteri yang dipilih diharapkan memiliki rekam je-

jak bagus di bidangnya dan memiliki integritas tinggi, baik berasal dari kalangan partai politik maupun profesional yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom PT Bank BNI Tbk (BBNI), mengatakan pelemahan IHSG dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa diatasi dengan memberikan respons positif kepada pasar dengan menempatkan menteri-menteri dibidang ekonomi sesuai dengan kompetensi. Penempatan tersebut

tentunya tidak harus 100% sesuai ekspektasi pasar melainkan cukup 75% agar pasar dan publik sedikit mendapat kepercayaan bahwa kabinet Jokowi-M Jusuf Kalla (JK) efektif mendorong pembangunan. Ryan optimis bila upaya tersebut dilakukan, IHSG berpotensi kembali ke 5.200 poin dan rupiah di kisaran Rp 11.750-11.900 per dolar AS. "Saya masih lihat kondisi politik ini sesat saja sebab kedepan disaat para elite politik berkumpul dalam komisi, kepentingan akan mencair lantaran melobar dalam tugas-tugas anggaran, sehingga kans IHSG dan ru-

piah akan kuat lagi ditambah kinerja Jokowi-JK semakin lebih baik," tegasnya. Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, mengatakan IHSG dan rupiah yang melemah tentu bisa diatasi dengan faktor positif seperti pengumuman kabinet baru yang diinginkan pasar. Presiden terpilih Jokowi diharapkan menunjuk menteri ekonomi yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi dalam beberapa bulan ke depan Indonesia akan menghadapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berpotensi memperlambat pertumbuhan. "Ini

membutuhkan menteri di bidang ekonomi yang menetapkan kebijakan ekspansif meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Purbaya. Pekan ini, Jokowi dijadwalkan mengumumkan struktur kabinet dan nama pengisi kursi menteri pemerintahan mendatang. Purbaya menilai menteri koordinator perekonomian Chairul Tanjung masih layak masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Sedangkan untuk Menteri Keuangan, Purbaya menilai perlu sosok yang paham kebijakan fiskal dan bisa menggunakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan diterima pasar.



Segera Umumkan Personel Kabinet

Sambungan dari Halaman 1

Menurut David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), jika mengizinkan kabinet Jokowi-JK positif terhadap pasar tentu menteri yang ditunjuk harus jelas portofolionya, independen, nonpartisan dan kompeten di bidangnya untuk menghindari konflik kepentingan. Menteri-menteri ekonomi yang bisa mengisi pos-posnya bisa berasal dari muka lama dan profesional seperti Chairul Tanjung sebagai menteri koordinator, kemudian Chabib Basri dan Bambang Brodjonegoro yang bagus mengelola fiskal. Nama lain, seperti mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar juga dinilai sangat layak untuk masuk dalam kabinet mendatang.

Sentimen Sehat

Ekonom menilai gejolak politik menjadi salah satu yang memberikan tekanan terhadap ekonomi nasional. Namun tekanan yang berasal dari politik hanya sentimen negatif yang tidak berdampak signifikan. Sentimen politik seperti ini, sering digunakan pelaku pasar untuk merealisasikan keuntungan (*profit taking*). Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir merupakan cerminan dari kekhawatiran pelaku pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang rapuh. Ekonomi Indonesia juga berhadapan dengan defisit neraca transaksi berjalan serta defisit anggaran karena beban subsidi. Untuk mengatasi gejolak po-

litik, pemerintahan baru Jokowi-JK harus fokus menyelesaikan masalah struktural. Misalnya, rencana menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 3.000 per liter pada November harus mendapat dukungan banyak pihak, termasuk dari partai politik yang berasal dari Koalisi Merah Putih, yang saat ini menguasai parlemen. Sementara itu, Tim Transisi mengatakan, penyesuaian program kerja hanya akan dilakukan dengan mengubah struktur belanja pemerintah baru. Hasto Kristianto, Deputi Tim Transisi Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakin pemerintah baru dapat menjalankan program-program tanpa mengalami penolakan dari parlemen. Saat ini, 292 kursi parlemen (52,14%) dikuasai oleh lima partai nonpemerintah.

Presiden terpilih Jokowi mengusung beberapa program utama seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Selain itu, pemerintah baru akan memperkuat sektor maritim dan pertanian. Hasto menjelaskan program yang dijanjikan Jokowi akan menggunakan APBN Perubahan (APBNP) 2014 dan APBN 2015 yang sudah disepakati antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyesuaian akan dilakukan dengan mengubah belanja Kementerian/Lembaga (K/L). "Program kami akan menggunakan anggaran yang sudah ada. Pak Jokowi saat membuat Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar itu anggaran juga sudah diketahui sebelumnya," kata Hasto. Pada APBN 2015, belanja K/L

dipatok sebesar Rp 647,3 triliun sementara belanja non K/L mencapai Rp 745,1 triliun. Dengan alokasi ini, pemerintah baru yakin Sembilan Agenda Nyata atau 'Nawa Cita' dapat direalisasikan dengan segera. Meski demikian, pemerintah baru juga telah mengantisipasi segala kemungkinan penolakan dari parlemen mengenai inovasi baru dalam belanja negara yang diajarkan presiden terpilih. "Kalau ditolak, kita akan gunakan ruang fiskal yang ada saja. Eksekutif itu kuat, presiden yang menegakkan keuangan negara," tutur Hasto. Melihat situasi di parlemen yang lebih banyak dikuasai koalisi non-pemerintah, pemerintah baru juga menyiapkan skenario antisipasi jika rencana pengajuan APBN Perubahan 2015 ditolak parlemen. Hasto yakin argumen dan program pro rakyat yang diajukan pemerintah baru akan mendapat dukungan dari masyarakat.

"Nanti akan terjadi perdebatan mengenai APBN Perubahan 2015 yang berkualitas dan kami siap untuk itu. Kalau tidak disetujui, masih ada APBN yang sebelumnya (2014), masih bisa kita pakai," kata Hasto. Bambang PS Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan II, menilai pasar menium sentimen negatif jika hubungan antara pemerintah dan DPR tidak harmonis. Upaya pemerintah baru untuk melaksanakan reformasi kebijakan akan terhambat. "Jika hubungan pemerintah dengan DPR tidak mulus, itu susah. Kalau mengubah undang-undang, itu harus dengan DPR. Harus keuletan pemerintah dan DPR itu saling mendukung," jelas Bambang.



Pemerintah baru optimis programnya akan tetap berjalan meski parlemen dikuasai oposisi.

Muhammad Faisal, Ekonom Centre of Reform on Economics, menilai pemerintah baru dapat menyetujui peta parlemen dengan meningkatkan pendapatan negara dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika pemerintah baru dapat meningkatkan pendapatan negara, program pemerintah tidak akan terhalang oleh parlemen.

Pada APBN 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.380 triliun dengan tax ratio sebesar 12,38% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara PNBP ditargetkan sebesar Rp 410,3 triliun. Faisal berpendapat presiden terpilih perlu menunjuk orang yang tepat untuk mengisi pos di Kementerian Keuangan dan beberapa direktorat jenderal di dalamnya.

"Sosok Menteri Keuangan harus mampu punya kemampuan manajemen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara, bukan hanya paradigma spending," ucapnya. Saat ini, Tim Transisi dan presiden terpilih masih melakukan pendalaman atas beberapa pilihan pengisi kursi menteri. Hasto menegaskan meski mendapat perlakuan dari Koalisi Merah Putih di parlemen, pemerintah baru tidak akan melakukan politik transaksional terkait pengisi kursi menteri. "Tidak mungkin kami menyerahkan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Direktur Utama PT Pertamina, Dirjen (Direktur Jenderal) Pajak yang sarat dengan kepentingan bisnis karena semua ini hendak dibruskan oleh Pak Jokowi," tegas Hasto. ●

Presiden terpilih diharapkan menunjuk menteri ekonomi yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi

Hashtag Berita :

#PresidenTerpilih #KabinetBaru #TransisiPemerintah #RKP(RencanaKerjaPemerintah)